

**PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI USAHA BERBASIS DIGITAL OLEH DPD I
KNPI SULAWESI SELATAN**

ERWIN WIJAYA

P022171311



PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

MANAJEMEN KEPEMIMPINAN PEMUDA

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020



LEMBAR PENGAJUAN

Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dalam Pengembangan Potensi Usaha Berbasis Digital Oleh DPD I KNPI Sulawesi Selatan

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai magister

Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah/ Manajemen Kepemimpinan Pemuda

Disusun dan Diajukan oleh:

Erwin Wijaya

Nomor Pokok P022171311

Kepada

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



TESIS

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI USAHA BERBASIS DIGITAL
OLEH DPD I KNPI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

ERWIN WIJAYA
Nomor Pokok P022171311

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 20 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

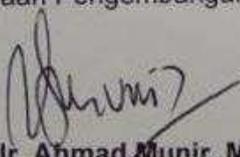
Menyetujui

Komisi Penasehat,


Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA
Ketua


Dr. M. Ramli AT., M.Si
Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah


Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc



ABSTRAK

ERWIN WIJAYA. *Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dalam Pengembangan Potensi Usaha Berbasis Digital oleh DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Budimawan dan Ramli A.T.).

Penelitian ini bertujuan (1) memahami kompetensi literasi digital organisasi kepemudaan dalam usaha berbasis digital di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan; (2) menjelaskan potensi usaha berbasis digital organisasi kepemudaan di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan; dan (3) mengetahui upaya pemberdayaan organisasi kepemudaan dalam usaha berbasis digital di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian dilaksanakan dan difokuskan pada pengurus komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan dan organisasi kepemudaan dalam naungan KNPI yang terlibat langsung dalam program pengembangan usaha berbasis digital. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Data dikumpulkan melalui hasil wawancara dan subjek/dokumentasi serta draf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kompetensi literasi digital organisasi kepemudaan dalam usaha berbasis digital di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan untuk organisasi kepemudaan yang diteliti, dalam hal ini Badko HMI Sulselbar, PKC PMII Sulsel, dan DPD IMM Sulsel beserta pengurusnya relatif memiliki kesamaan, yaitu secara kelembagaan ketiga organisasi kepemudaan tersebut belum memahami kompetensi literasi usaha berbasis digital; (2) potensi usaha berbasis digital organisasi kepemudaan di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu organisasi kepemudaan di bawah naungan DPD I KNPI Sulsel yang diteliti, dalam hal ini Badko HMI Sulselbar, PKC PMII Sulsel, dan DPD IMM Sulsel memiliki kesamaan dalam hal usaha berbasis digital, yaitu ketiganya tidak terlibat aktif dalam usaha berbasis digital sehingga dapat dikatakan tidak ada potensi usaha berbasis digital secara kelembagaan di organisasi kepemudaan; dan (3) upaya pemberdayaan organisasi kepemudaan dalam usaha berbasis digital yang dilaksanakan oleh DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil menjalankan program kerjanya dalam hal menumbuhkan minat usaha berbasis digital. Namun, secara kelembagaan tidak mampu memberdayakan organisasi kepemudaan dalam usaha berbasis digital dengan berbagai faktor dan kendala yang dihadapi.

Kata kunci: pemberdayaan organisasi kepemudaan, potensi usaha berbasis digital



ABSTRACT

ERWIN WIJAYA. *The Empowerment of Youth Organization in the Development of Digital-Based Business Potential by DPPI I PNPI of South Sulawesi Province* (supervised by **Budimawan and Ramli AT**)

This research aimed (1) to understand the digital literacy of the North Sumatra Province; (2) to explain the business potential of digital youth organizations in KNPI DPD I of South Sulawesi Province; and (3) to find out how to empower the youth organization in digital-based business in the KNPI DPD I, South Sulawesi.

The research was conducted and focused on the board of the Indonesian National Youth Committee (KNPI) of South Sulawesi Province and the Youth organizations under KNPI who were directly involved in the program of the digital-based business development. The method used was qualitative with the descriptive translation. The data were collected through interviews with the subjects and from the documents and drafts.

The research results indicated that (1) the digital literacy competence of the youth in the business-based on the digital in DPD I of South Sulawesi Province KNPI, the youth organizations studied, such as Badko HMI of Sulbar, PKS PMII of Sulsel, and DPD IMM of Sulsel with their boards relatively had similarities, i.e. institutionally the three youth organizations had not understood the competence of digital-based literacy; (2) The potential of digital-based business of the youth organization in DPD I of KNPI of South Sulawesi Province, namely the youth organizations under DPD I of KNPI of South Sulawesi, such as Badko HMI Sulbar, PKC PMII Sulsel and DPD I IMM had the similarity in digital-based business, such that their boards did not involve actively in the digital-based business, so that it could be concluded that institutionally there was no potential of the digital-based business in the youth orgaqnizations; (3) the empowerment efforts of the youth organizations in the digital-based business done by DPD I of KNPI of South Sulawesi Province had successfully ran the work program in promoting the interest of the digital-based business. However, institutionally it was unable the empower the youth organization in the digital-based business with the various factors and the inhibits faced.

Keywords: *empowerment of youth organization, potential of digital-based business*



Optimization Software:
www.balesio.com

PRAKATA

Segala puji dan syukur hanya mampu penulis panjatkan ke hadirat Allah swt semata, atas segala nikmat dan karunia-Nya. Ketidakmampuan penulis untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidup sendirian, menghasilkan kebergantungan yang utuh pada zat-Nya. Shalawat dan salam dikirimkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta mereka yang berjalan di atas ajarannya. Atas segala upayanya untuk menghadirkan ajaran yang sungguh menjawab persoalan-persoalan hidup dengan prinsip selesai utuh dalam ketenangan.

Penyelesaian tesis ini dapat terwujud atas bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil, selama penulis menempuh jenjang pendidikan di Universitas Hasanuddin. Oleh karena demikian, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M. A. selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M. Eng. selaku Ketua Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.



4. Prof. Dr. Budimawan, DEA. selaku dosen pembimbing I, Dr. H. Ramli AT, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bantuan, dan bimbingan kepada penulis.
5. Prof. Dr. Ir. Mursalim, Dr. Arifuddin Akil, M.T., dan Hasbi, M.Si., Ph.D selaku dosen penguji yang memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan pengasuh mata kuliah dari berbagai program studi yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan.
7. Wawing dan Nurlina, kedua orang tua penulis yang senantiasa memanjatkan doa dan mengupayakan segala yang terbaik untuk mendukung terwujudnya mimpi anak-anaknya.
8. Irmayanti dan Muh. Reizal, kedua adik penulis yang selalu dapat menghibur, memperhatikan dan menyemangati penulis setiap saat.
9. Terima kasih kepada pengurus DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan dan pengurus MPI Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat magister.
10. Terima kasih pula kepada Ketua DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPD IMM Sulsel, Ketua PKC PMII Sulsel dan Ketua HMI Badko Sulselbar yang telah bersedia menjadi narasumber dalam Tesis ini.

Teman-teman Kelas Perencanaan Pengembangan Wilayah/Manajemen Kepemimpinan Pemuda 2017, terima kasih



atas kebersamaan, penerimaan dan pertemanaannya selama ini.

See you on top!

12. Terima kasih juga kuhaturkan kepada Keluarga Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare (Hipmi Pare), Patriot 17 Sulsel, Pemuda-Pemudi Sulsel, HMI Badko Sulselbar, GPII Sulsel, Ikatan Keluarga Masyarakat Parepare (IKM PARE), IKA UNM, El-Nino '09, RADESAH Labattoo yang menjadi wadah penyemangat penulis dalam menyelesaikan tesis.

Semoga, Allah swt.membalas seluruh jasa-jasa mereka dengan pahala yang besar dari sisi-Nya.

Akhirnya, semoga hasil kerja ini juga bernilai amal ibadah serta bernilai dakwah tertulis yang diterima di sisi Allah *'azza wa jalla*.

A<mi>n Ya Rab al-'A<lami>n

Makassar, 1 januari 2020

Penulis,

Erwin Wijaya

NIM. P022171311



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGAJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pemberdayaan Organisasi.....	9
B. Usaha Berbasis Digital	16
C. Organisasi Kepemudaan	21
D. Definisi Operasional.....	26
E. Kerangka Pikir	27
BAB III	29
A. PENDAHULUAN.....	29
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Kehadiran Penelitian	30



C. Lokasi Penelitian	31
D. Sumber Data Teknik Pengumpulan Data	31
E. Analisis Data	34
F. Pengecekan dan Keabsahan Data	36
G. Rencana Tahap Penelitian	37
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).....	38
B. Kompetensi Literasi Digital Organisasi Kepemudaan di DPD I KNPI di Provinsi Sulawesi Selatan	50
C. Potensi usaha berbasis digital organisasi kepemudaan di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan	60
D. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Dalam Usaha Berbasis Digital di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan.....	65
BAB V	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	80
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka pikir	27
Gambar 2 : Skema Komponen dan Proses Analisis Data Menurut Miles dan Huberman (Moleong, 2012)	35
Gambar 3 : Rencana Tahap Penelitian	37
Gambar 4 : Peta Administrasi Organisasi Kepemudaan Sulawesi Selatan	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	14
Tabel 2 : Indikator Kompetensi Digital	21
Tabel 3 : Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	33
Tabel 4 : Daftar Program Kerja Kepengurusan	47
Tabel 5 : Jumlah Organisasi Kepemudaan dibawah naungan KNPI Sulsel.....	49
Tabel 6 : Indikator Kompetensi Literasi Digital	56
Tabel 7 : Indikator Upaya Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemuda merupakan sumber daya paling potensial yang diharapkan mengisi berbagai posisi di tengah masyarakat. Karena perannya yang sangat penting maka pemuda diharuskan mampu mempertahankan tradisi dan idealismenya sebagai identitas. Dalam masyarakat diperlukan peran pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya bangsa, pondasi kekuatan moral serta agen perubahan ke arah yang lebih baik. Sejarah telah mencatat perjuangan pemuda dengan organisasi Budi Utomo serta peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam upaya merebut kemerdekaan dari penjajahan kolonial. Peran pemuda juga disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 16 yaitu: "Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional". Ada peribahasa yang mengungkapkan bahwa barang siapa menguasai pemuda, maka akan menguasai masa depan (Tilaar, 1991).

Pembangunan pemuda menjadi program penting bagi setiap negara di dunia, Pemuda selalu dikategorikan sebagai aset terbesar bangsa sekaligus harapan dalam menegakkan cita-cita bangsa, selain itu ia juga bagian penting dari zaman yang diharapkan dapat menjadi *agent of* Dewanta dkk, 2008).



Peran dan partisipasi pemuda sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara selalu berusaha untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter pemudanya. Melihat begitu besarnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan, maka pemuda haruslah memiliki wadah yang dapat menampung ide dan gagasan mereka. Oleh karena itu, upaya mewujudkan cita-cita bangsa, para pemuda banyak yang memilih aktif kedalam organisasi kepemudaan yang kemudian dijadikan sebagai wadah penyaluran segala ide dan gagasan, (Wahab dkk, 2011).

Di era saat ini, cukup banyak organisasi kepemudaan yang dapat dijadikan sebagai wadah pengembangan dan penempatan diri dalam membentuk karakter. Contohnya, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi yang konsen didunia usaha dan industri kreatif, organisasi pemuda pecinta alam ataupun organisasi lain yang berdiri di suatu wilayah tertentu seperti di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Salah satu organisasi yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menanamkan nilai dan karakter pemuda adalah organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan. KNPI Sulawesi Selatan sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan telah banyak mencetak pemuda-pemudi yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat khususnya kepemimpinan pemuda di Sulawesi Selatan.

Generasi muda adalah sumber daya produktif yang dengan ide kreatifnya membuka peluang kerja. Pemuda dengan segenap inovasi yang di miliki melahirkan kreativitas nyata melalui dunia usaha. Perkembangan



ekonomi kreatif saat ini tidak terlepas dari keberadaan pemuda sebagai gudang kreativitas. Howkins (2001) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai ekonomi yang menjadikan kreatifitas, budaya, warisan budaya dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan. Konsep kreatif ini lebih dikenal dengan istilah industri kreatif karena industri kreatif merupakan bagian dari ekonomi kreatif itu sendiri. Menurut *United Kingdom Departemen Culture, Media and Sport (DCMS, 2001)*, industri kreatif memerlukan kreatifitas, keterampilan, dan bakat yang dilakukan untuk penciptaan kesempatan kerja dan kesejahteraan melalui eksploitasi properti intelektual.

Namun, sayangnya kurang dimanfaatkan dengan baik. Hal tersebut karena masih banyaknya segelintir pemuda yang melakukan atau terlibat kejahatan seperti, pencurian, narkoba, tawuran, sampai pergaulan bebas. Tentu kita tidak ingin hal ini terus terjadi. Maka pemuda perlu di arahkan untuk melakukan hal baik. Selain itu, agar generasi muda terpacu mengeksplor ide kreatif dalam dirinya, pemuda bisa di arahkan ke dunia bisnis.

Bisnis di Indonesia saat ini didominasi berbasis digital. Dari bisnis *offline* ke *online*. Pelaku usaha memadukan keduanya untuk memasarkan produk mereka. Banyak pengusaha yang sukses dalam mendirikan bisnis digital, yang sering disebut start up atau usaha rintisan. Bisnis digital di Indonesia muncul sejak internet sudah masuk ke Indonesia. Potensi bisnis digital tentunya sangat menjanjikan. Hal ini terlihat dari bagaimana perkembangan bisnis digital ini tumbuh pesat. Perkembangan ekonomi Indonesia sudah mulai memberikan

lagi dunia kreatif berbasis digital dengan munculnya berbagai macam Para ahli memandang bahwa potensi peluang bisnis digital di Indonesia us tumbuh seiring dengan meningkatnya pengguna internet, semakin



membbaiknya infrastruktur komunikasi, dan semakin terjangkau harga *smartphone*. Pada data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia sudah mencapai angka 132,7 juta orang. Sebagian besar pengguna internet berasal dari pengguna *smartphone*. Jumlah tersebut bisa menjadi acuan anak muda di Indonesia untuk memulai usaha melalui bisnis digital. Karena peluangnya masih terbuka lebar, apalagi banyak konsumen yang lebih memilih untuk belanja *online* dan melakukan aktivitas di dunia *online*.

Faktanya, potensi besar usaha berbasis digital ini nampaknya kurang diminati oleh organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP) untuk dijadikan program kerja kelembagaan. Padahal, rata-rata yang mendirikan bisnis usaha berbasis digital adalah para pemuda dengan memanfaatkan media sosial sebagai pusat pemasaran.

Permasalahan utama dalam mengembangkan minat usaha pemuda adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya menjadi pemuda yang mandiri melalui bidang usaha. Banyak di kalangan mereka justru menjadi *broker* politik dan menjadi alat untuk meraih kekuasaan. Pemuda yang tergabung dalam Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) lebih berorientasi kepada pergerakan politik dan kekuasaan sehingga mereka cenderung memilih cara instan untuk menjadi terkenal, namun dari aspek ekonomi pemuda jauh tertinggal. Untuk itu, perlu adanya pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda untuk membangun kemandirian serta mengubah pola pemikiran pemuda dalam upaya membangun usaha berbasis digital.



dari data yang ada, terdapat empat penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian ini. Pertama, penelitian Lutfi Wibawa (2016) yang berjudul *Pengembangan Model Pelatihan Kepemimpinan bagi Organisasi*

Kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebutuhan pelatihan kepemimpinan pengurus organisasi kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi kebutuhan pilihan keorganisasian, kebutuhan pelatihan instruktur, pelatihan kader inti dan instruktur. Selain itu, diperlukan pengembangan model pelatihan diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan daerah di DIY yang model pelatihan diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan mulai dari orientasi kepemudaan.

Kedua, penelitian oleh Rizki Muhammad Ramdhan (2014) yang berjudul *Peranan Kepemimpinan Organisasi Kepemudaan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa (Studi Deskriptif pada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KNPI kecamatan Nagrak berperan dalam kepanitiaan di Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, dan lain-lain sebagai langkah efektif dalam rangka pencerdasan politik masyarakat desa, namun peranan KNPI masih perlu ditingkatkan. Model kepemimpinan yang diterapkan ialah model kepemimpinan partisipatif dan pendelegasi.

Ketiga, penelitian oleh Astatia Damaiska (2012) yang berjudul Analisis Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Nasional yang Bersekretariat di DKI Jakarta Pasca terbitnya Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009. Hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Nasional yang bersekretariat di DKI Jakarta setelah terbit UU Kepemudaan belum berhasil terlaksana sehingga membutuhkan peninjauan kembali terkait

dan Undang-undang kepemudaan yang mengatur hal tersebut. Hal ini dikarenakan oleh sosialisasi pemberdayaan oleh Kemenpora dikarenakan oleh sosialisasi



peraturan UU Kepemudaan yang belum merata dan tingginya penolakan peraturan pembatasan usia pemuda.

Keempat, penelitian oleh Hasanah (2015) yang berjudul Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa pengembangan industri kreatif berbasis budaya di DIY memiliki potensi yang besar karena didukung oleh kekayaan budaya yang melimpah, akan tetapi dalam pengembangan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan SDA yang produktif dan keterbatasan bahan baku. Di samping itu, keterampilan wirausaha muda ekonomi kreatif berbasis budaya harus ditingkatkan dari sekadar penguasaan industri kreatif menjadi penguasaan di bidang inovasi dan pemasaran hasil.

Berdasarkan paparan diatas, telah banyak penelitian yang terkait dengan peran organisasi pemuda dalam pengembangan organisasi dan SDM anggotanya. Namun, khusus organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan belum ada penelitian yang fokus pada pengembangan potensi usaha berbasis digital. Padahal melihat besarnya potensi pemuda dan lapangan usaha yang dapat dikembangkan di Sulawesi Selatan menjadi alasan saya untuk melakukan penelitian "Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dalam Pengembangan Potensi Usaha Berbasis Digital oleh DPD I KNPI Sulawesi Selatan"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, hal yang rumusan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana kompetensi literasi digital organisasi kepemudaan dalam usaha berbasis digital di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana potensi usaha berbasis digital organisasi kepemudaan di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana upaya pemberdayaan organisasi kepemudaan dalam usaha berbasis digital di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Memahami kompetensi literasi digital organisasi kepemudaan dalam usaha berbasis digital di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Menjelaskan potensi usaha berbasis digital organisasi kepemudaan di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Mengetahui upaya pemberdayaan organisasi kepemudaan dalam usaha berbasis digital di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan?

2. Kegunaan

- a. Kegunaan Praktis

Tulisan ini adalah sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar magister (strata dua) di bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan menjadi referensi dalam mengetahui dan memahami bentuk pemberdayaan organisasi kepemudaan dalam pengembangan potensi usaha berbasis digital di DPD I KNPI Sulawesi Selatan.

- b. Kegunaan akademis



Sebagai akademisi, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan rujukan pemberdayaan organisasi kepemudaan dalam pengembangan potensi usaha berbasis digital di DPD I KNPI Sulawesi Selatan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Organisasi

Secara etimologis, pemberdayaan (*empowering*) berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Ambar, 2004)

Suparjan dan Hempri (2003) mengatakan pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat (Anwar, 2007)

Dalam konteks pemberdayaan organisasi kepemudaan, pemberdayaan organisasi kepemudaan secara definitif diartikan sebagai proses kegiatan memberi daya (*energy, power*), kemampuan (*competence*), kewenangan (*authority*) kepada organisasi kepemudaan, dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya, berakal, berkemampuan, sehingga lebih mampu menyelesaikan masalah, atau mengatasi suatu masalah. Memberi dorongan psikologis agar lebih berdaya, lebih berkemampuan, serta memiliki kesadaran dan



motivasi untuk berprestasi. Dalam hal ini berdaya, berakal dan berkemampuan, tentunya yang berkaitan dengan penggalian potensi pengurus atau anggota organisasi kepemudaan dalam berorganisasi, bermasyarakat dan peningkatan kesejahteraan organisasi dan pribadinya.

Menurut Mulyadi (2000) pemberdayaan berarti memampukan (*to able*), memberi kesempatan (*to allow*), dan mengizinkan (*to permit*) yang dapat diartikan baik melalui inisiatif sendiri maupun dipicu orang lain. Pemberdayaan organisasi kepemudaan berarti memampukan dan memberi kesempatan kepada anggota dan pengurus organisasi melakukan fungsi fungsi manajemen dalam skala yang menjadi tanggungjawabnya, baik secara individu maupun kelompok.

Dalam pengertian yang diberikan terhadap pemberdayaan, jelas dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik daya dalam pengertian kemampuan dan keberanian maupun daya dalam arti kekuasaan atau posisi tawar. Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*) (Totok dan Poerwoko, 2017).

Hakekatnya pemberdayaan merupakan suatu konsep yang diharapkan

memberikan kesempatan dalam membentuk individu maupun kelompok lebih berdaya, mandiri dan berani melalui proses belajar sehingga terjadi



perbaikan keadaan. Menurut Ambar (2004) konsep pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata muncul tanpa tujuan. Pemberdayaan erat kaitannya dengan pembangunan, dan pembangunan merujuk pada tujuan dan perbaikan. Menurut Totok dan Poerwoko (2013) mengemukakan dalam tulisan World Bank menyebutkan bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok 16 masyarakat miskin untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya.

Kajian-kajian konseptual tentang pemberdayaan menyajikan banyak indikator keberdayaan. Empat diantaranya menyangkut derajat keberdayaan, Hairi (2012) menyebutkan yaitu a) tingkat kesadaran dan keinginan berubah (*power to*); b) tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*); c) tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*); d) tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (*power with*). Derajat keberdayaan suatu kelompok atau individu dimulai dan paling tinggi tingkatannya, dengan adanya kesadaran dan kemauan untuk (*power to*) berubah dan atau mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Dengan adanya kesadaran maka kelompok sasaran pemberdayaan diharapkan mampu mengembangkan potensinya dan memperoleh kesempatan atau akses untuk menyalurkan potensinya (*power within*), mampu menghadapi hambatan yang ada (*power over*) serta dapat tercipta sikap bekerja sama untuk mencapai tujuan (*power with*).

Tujuan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan adalah, perbaikan mutu pengurus dan kader organisasi kepemudaan, baik secara fisik, mental,



ekonomi maupun sosial budayanya. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2017).

Pranarka dan Prijono (1996) menyatakan bahwa pemberdayaan NGOs antara lain meliputi kemampuan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang efektif, independen dan berkesinambungan dengan mengupayakan :

a. Efektifitas, Keterbukaan dan Pertanggungjawaban

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan dan aktivitas NGOs dibutuhkan manajemen alternatif atau strategis. Dalam organisasi yang birokratis, tiap aspek dari struktur dirancang untuk menjamin kehandalan tingkah laku dan pertanggungjawaban terhadap pusat. Pusat memiliki kontrol yang menyeluruh. Semua keputusan tentang inovasi tertentu, perubahan, atau adaptasi dalam strategi harus berasal dari pusat. Keadaan ini menyebabkan organisasi menjadi kaku. Salah satu yang terpenting dalam manajemen strategi ini adalah bagaimana mengembangkan daya tangkap organisasi yang lebih baik terhadap kebutuhan kelompok sasarannya. Untuk itu, diperlukan inisiatif dan kemampuan melakukan penilaian diri serta harus mempunyai sistem-sistem kokoh misalnya untuk keperluan pertanggungjawaban.

...omi dan Sumber dana independen

...angan bagi organisasi-organisasi seperti NGOS yaitu untuk dapat
...bertahankan otonomi dan independensinya adalah mencari jalan untuk



meningkatkan sumber dana penerimaan yang berasal dari jasa pelayanan dan kegiatannya. Bila organisasi tersebut memiliki dana yang memadai untuk menutupi biaya operasional rutin, organisasi tersebut tidak akan terlalu bergantung kepada lembaga donor atau pemerintah.

c. Jaringan kerja

Jaringan kerja atau *networking* adalah *process of being to listen and learn from each other*. Terdapat dua jenis jaringan kerja yaitu fungsional, yang mementingkan partisipasi, relevansi, pragmatisme dan jaringan kerja institusional yang mementingkan keanggotaan, koordinasi dan formalitas. Jaringan kerja meliputi tukar menukar informasi, membagi pengalaman, saling mendukung isu-isu yang menjadi perhatian bersama.

Sugeng (2013) menyatakan suatu masyarakat dikatakan berdaya apabila mereka dapat tampil sebagai pelaku utama dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Tujuan adanya pemberdayaan ialah untuk membantu menjawab kegelisahan masyarakat tentang masalah ekonomi. Tingkat keberdayaan masyarakat dapat ditunjukkan dengan munculnya masyarakat sebagai pemecah masalah yang sedang dihadapi sehingga dapat berupaya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan lingkungannya.

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najati dkk, 2005:54).



Tabel 1
Prinsip pemberdayaan masyarakat

NO	INDIKATOR	DESKRIPSI
1.	Prinsip kesetaraan	Adanya kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.
2.	Partisipasi	Melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
3.	Keswadayaan atau kemandirian	Memiliki pemahaman tentang usaha, kondisi lingkungan, tenaga kerja
4.	Berkelanjutan	Program pemberdayaan dirancang secara jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

Sumber: Buku Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut

Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk



sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

d. Berkelanjutan

Konsep masalah (kesejahteraan atau perbaikan hidup) ini sesuatu yang sentral dalam pandangan islam. Karena, tindakan dan kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya harus terkait dengan kesejahteraan dan kebaikan kehidupan rakyat yang mereka pimpin (*tasaruf al-iman ala arro'iyah manutun bi al-maslahah* (Muh.Yunus, 2000). Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti,

pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.



B. Usaha Berbasis Digital

Usaha berbasis digital terus berkembang dengan pesat diseluruh dunia. Hal tersebut disebabkan usaha berbasis digital memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah, antara lain dapat mendorong pertumbuhan, inovasi, dan daya saing ekonomi. Era digital telah mengubah berbagai sistem termasuk dalam beraktivitas sehari-hari, berbisnis, bersosialisasi, dan berpolitik. Efisiensi dan substitusi sebagai fitur utama digitalisasi teknologi dan perangkat kerja ternyata membawa berbagai efek positif dan negatif dalam segi ekonomi. Revolusi teknologi informasi telah mengubah lanskap dunia pemasaran dalam beberapa tahun terakhir ini. Metode komunikasi pemasaran yang sebelumnya bersifat tradisional dan konvensional, kini telah terintegrasi dalam dunia digital (Suwatno, 2017:99).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akhir-akhir ini dirasakan hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat. Sebagaimana setiap kemajuan teknologi komunikasi yang lain, internet masuk ke berbagai bentuk kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena komunikasi adalah salah satu kebutuhan yang mendasar pada masyarakat. Teknologi internet berkembang dan menyatu dalam sebuah dunia atau ruang maya yang sering disebut sebagai *cyber-space*, sebuah dunia atau tempat orang dapat berkomunikasi, bertemu, dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi/bisnis (Amin, 2012).

Di dalam negeri, perkembangan usaha berbasis digital sudah tidak dapat diragukan lagi, terlebih di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Di Indonesia, transaksi digital semakin berkembang. Dari

ng dirilis Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo),

a kini menjadi salah satu raksasa bisnis online di wilayah Asia Pasifik.



Dalam lima tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2011. Penggunaan *E-banking* dalam transaksi ekonomi semakin berkembang pesat. Barang kebutuhan dasar yang semula hanya dapat diperdagangkan dalam transaksi konvensional, kini sudah dapat dilakukan dalam bentuk perdagangan digital. Indonesia telah memiliki perusahaan digital seperti Go-jek, Blibli, dan Traveloka yang terus berkembang. Masyarakat sebagai konsumen tidak perlu lagi memusingkan waktu dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan ketika membutuhkan sebuah barang. Dari segi sosial dan budaya, masyarakat Indonesia pada saat ini sudah semakin maju. Terbukti menurut *survey* dari situs *WorldBank.org*, Indonesia mengalami peningkatan pengguna internet yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mulai mengikuti perkembangan teknologi di dunia. Hal ini juga menjadi parameter pertumbuhan perekonomian digital suatu negara (Amin, 2012).

Dunia digital menjadi krusial bagi seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas bisnis. Beberapa indikator yang bisa digunakan saat ini antara lain pertumbuhan kepemilikan smartphone yang menyediakan kemudahan akses internet, perbaikan infrastruktur telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas akses data, serta diluncurkannya layanan 4G. Pertemuan antara penjual dan pembeli tidak lagi harus dilakukan secara nyata, namun transaksi jual beli sudah dapat dilakukan di dunia maya tanpa harus bertatap muka. Usaha digital memudahkan pebisnis memantau dan menyediakan segala kebutuhan dan keinginan calon konsumen, di sisi lain calon konsumen juga bisa mencari dan

menemukan informasi produk hanya dengan cara menjelajah dunia maya mempermudah proses pencariannya. Pembeli kini semakin mandiri membuat keputusan pembelian berdasarkan hasil pencariannya. Usaha



digital dapat menjangkau seluruh masyarakat di manapun mereka berada tanpa ada lagi batasan geografis ataupun waktu.

Pesatnya perkembangan teknologi, dunia digital dan internet tentu juga berimbas pada dunia pemasaran. Tren pemasaran di dunia beralih dari yang semula konvensional (*offline*) menjadi *digital (online)*. Strategi digital marketing ini lebih prospektif karena memungkinkan para calon pelanggan potensial untuk memperoleh segala macam informasi mengenai produk dan bertransaksi melalui internet.

Dunia maya kini tak lagi hanya mampu menghubungkan orang dengan perangkat, namun juga orang dengan orang lain di seluruh penjuru dunia. Data yang dilansir oleh *We are Social*, sebuah agensi usaha digital di Amerika, menyebutkan bahwa *platform* media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia per Januari 2017 adalah *Youtube* (49%) dan oleh *Facebook* (48%). Posisi selanjutnya ditempati oleh *Instagram* (39%), *Twitter* (38%), *Whatsapp* (38%), dan *Google* (36%). Sisanya ditempati secara berurutan oleh *FB Messenger*, *Line*, *Linkedin*, *BBM*, *Pinterest*, dan *Wechat* (Kemp, 2017).

Sri Widowati, *Country Head Facebook* Indonesia, menyampaikan bahwa pengguna Facebook di Indonesia membuka halaman Facebook milik mereka rata-rata 80 kali sehari (Utomo, 2016). Menurut data Facebook, 74% pengguna internet di Indonesia menggunakan perangkat mobile (Utomo, 2016). Ia juga mengungkapkan data bahwa sebanyak 45% pengguna internet di Indonesia lebih suka berbelanja secara *online*. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Hal ini

menyebabkan perilaku masyarakat Indonesia yang semakin mengarah ke gaya digital. Namun peluang ini sepertinya tidak diikuti oleh perubahan



perspektif mayoritas perusahaan dan individu yang terlibat dalam dunia usaha digital. Meski perusahaan besar, kecil, maupun individu kini sudah mulai menggunakan digital dan media sosial sebagai salah satu alat berpromosi atau mendekati diri kepada konsumen, namun sayangnya jumlahnya masih sangat terbatas. Pemanfaatan pemasaran melalui media digital masih belum maksimal jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet yang drastis. Berdasarkan hasil riset *McKinsey*, baru sekitar 30% usaha di Indonesia yang menggunakan instrumen digital dalam mengembangkan usahanya (Supriadi, <http://www.marketing.co.id>, 2016). Melihat hal ini, dapat kita simpulkan bahwa potensi usaha digital di Indonesia sangat besar.

Perkembangan usaha berbasis digital menjadi salah satu misi pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2020. Targetnya adalah nilai potensi ekonomi digital Indonesia pada 2020 mencapai 130 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 1, 690 triliun dengan kurs Rp 13.000 per dollar AS. Misi tersebut merupakan misi yang besar dan cukup sulit dibandingkan dengan sumberdaya yang dimiliki Indonesia, khususnya sumberdaya manusia (Auliani, 2016).

Pengalaman sejumlah perusahaan rintisan atau *startup* yang kini telah tumbuh besar seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan roket pendorong utama yang dapat membuat sebuah lompatan katak (*leap frog*) dari titik nol, melewati banyak tahap sekaligus, untuk mencapai titik yang lebih jauh dari yang dapat dicapai perusahaan-perusahaan konvensional lainnya (Rudiantara, 2018).

Armin (2017) mengatakan strategi Indonesia dalam pembangunan digital dipahami sebagai pembangunan ekonomi Indonesia di era



digital. Karena itu, pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan inklusif, melibatkan semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat dimana digital sebagai *platform* memungkinkan penciptaan nilai tambah. Untuk itu perlu penyesuaian berbagai kebijakan untuk memanfaatkan digital secara maksimal.

Diantara strategi pengembangan ekonomi digital Indonesia adalah mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara efisien dan terkoneksi secara global. Selain itu, dilakukan pula upaya untuk mendorong kreasi, inovasi dan invensi kegiatan inovasi baru di kalangan generasi muda. Lebih jauh, pemerintah juga berupaya untuk memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam pemanfaatan *e-Commerce* (Nasution, 2017).

Rudiantara (2018) Menambahkan kepemimpinan di era digital harus ditempuh setidaknya dengan tiga prinsip, yaitu *less of a regulator*, dengan melakukan simplikasi regulasi, penyederhanaan, dan penghapusan perizinan; *more of a facilitator*, dengan memberikan kebijakan afirmatif dalam pengembangan infrastruktur, mendorong kewirausahaan digital, dan menumbukan talenta ekonomi digital dan *more of an accelerator*, dengan mempercepat pertumbuhan *startup* digital baru dan sektor usaha lainnya terutama UMKM.

DigComp 2.0 dipilih sebagai kerangka acuan literasi digital untuk proyek penelitian ini. Ini telah disintesis dari kerangka kerja digital literasi utama lainnya dan menjalani proses konsultasi dan pengembangan yang panjang, sehingga menghadirkan pandangan komprehensif tentang bidang kompetensi dari negara-negara maju secara ekonomi.

dari data Unesco (2018) tentang DigComp 2.0 indikator kompetensi digital



Tabel 2
indikator kompetensi digital

NO	INDIKATOR	DESKRIPSI
1	Informasi dan literasi data	1.1 Menjelajah, mencari dan memfilter data, informasi, dan konten digital 1.2 Mengevaluasi data, informasi, dan konten digital 1.3 Mengelola data, informasi, dan konten digital
2	Komunikasi dan kolaborasi	2.1 Berinteraksi melalui teknologi digital 2.2 Berbagi melalui teknologi digital 2.3 Terlibat dalam kewarganegaraan melalui teknologi digital 2.4 Berkolaborasi melalui teknologi digital 2.5 Mengelola identitas digital
3	Pembuatan konten digital	3.1 Mengembangkan konten digital 3.2 Mengintegrasikan dan menguraikan kembali konten digital 3.3 Hak cipta dan lisensi 3.4 Pemrograman
4	Keamanan	4.1 Melindungi perangkat 4.2 Melindungi data pribadi dan privasi 4.3 Melindungi kesehatan dan kesejahteraan 4.4 Melindungi lingkungan
5	Penyelesaian masalah	5.1 Memecahkan masalah teknis 5.2 Identifikasi kebutuhan dan respons teknologi 5.3 Secara kreatif menggunakan teknologi digital 5.4 Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi digital

Sumber: Data Unesco (2018)

C. Organisasi Kepemudaan



Organisasi kepemudaan adalah lembaga yang menghimpun segenap anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Organisasi

kepemudaan ini berdiri bersama dengan visi dan stuktur kepemimpinan, budaya dan model aktualisasi ide dan gagasannya. Bentuk dari organisasi ini lebih banyak berkaitan dengan lembaga HMI, IMM, PMII, Bem dan lembaga organisasi ke daerah serta yang sejenis dari hal tersebut (Rambangeng, 2013).

Pemuda yang terhimpun di dalamnya menjalani proses kaderisasi, interaksi dan uji kemampuan memimpin dengan adanya struktur kepemimpinan yang di tata melalui forum-forum kongres dan pengambilan kebijakan strategis lainnya. Pendidikan dalam sistem perkaderan dan rekrutmen tercipta melalui proses ideologisasi, prosesnya dengan mengikuti tahapan perkaderan 1, perkaderan 2 dan tahapan selanjutnya perkaderan sosial dan keterampilan lainnya. Dari proses tersebut terjadi konsolidasi pemikiran, pembentukan watak, mental, tradisi dan kemampuan yang lebih dari pemuda yang tidak berorganisasi. Disinilah peran penting organisasi kepemudaan sebagai pembentuk karekater dan kualitas anak muda di Indonesia.

Dalam kepanitian anak muda yang tergabung dalam sebuah organisasi kepemudaan terlatih melakukan manajemen kepemimpinan dan koordinasi. Seorang ketua panitia dilatih melakukan koordinasi dengan panitia lainnya, pembagian tugas sehingga tercipta peran masing-masing. Ada yang mencari dana dengan melakukan registrasi para calon penyumbang dan sekmen mana yang bisa mensupportnya, ada juga yang melakukan konsolidasi calon peserta dan undangan agar kegiatan terjadi dengan efektif dan efisien, ada juga yang menjadi pengatur pameri dan penjadwalan kegiatan sesuai kepentingan

si, ada juga mengerjakan semuanya, campur aduk sama rasa dengan manajemen Tukang Sate, dia yang buat, dia yang masa, dia yang jual yang bagi bahkan dia yang makan. Ini menjadikan anak-anak aktivis



memahami bagaimana proses konsolidasi secara massif terjadi. Sementara dalam proses penataan kepengurusan mereka akan membagi tugas sesuai bidang garapan, atau sesuai kebutuhan struktur pengurus. Tidak selamanya sesuai profesi karena pemikiran lebih banyak berorientasi strategis tidaknya sebuah kelembagaan. Penentuan pengurus dan setelah terbentuk, ada yang bersifat kolektif dengan memasukkan semua faksi yang berbeda, ada juga yang dominan satu kelompok keduanya masing-masing memiliki keuntungan. Jika organisasi dibentuk dari sisi politik, maka kepengurusan yang bersifat kolektif akan membentuk kekuatan eksternal yang baik namun jika gagal konsolidasi internal akan terjadi pecahan berbahaya sementara ketunggalan kepengurusan sehingga tidak terjadi proses dialogis denganh semua komponen di dalamnya, kepengurusan akan lemah ke luar baik konsolidasi isu maupun pressur gerakan. Sementara pada konteks eksternal akan ada banyak kritikan, disini organisasi akan banyak mengurus urusan dapur karena banyaknya kritikan yang sifatnya ke dalam.

Berbeda dengan organisasi perkaderan model apapun strukturnya akan selalu melihat kepentingan logika perkaderan. Jika kepengurusan sifatnya kolektif kolegia maka akan terbentuk banyak kader pemimpin hasil kepengurusan sebab banyaknya terlibat dalam berbagai isu strategis melibatkan lembaga. Sementara untuk konteks kepengurusan yang sifatnya terbatas dan sempit akan membuat organisasi lebih konsen ke internal karena sedikitnya personil. Meski kelihatan ideal konsep ini namun mewujudkan kepemimpinan yang baik dan kuat

apai sepenuhnya. Selanjutnya dalam berbagai aktivitas keorganisasian yang berkembang adalah, isu sosial, lingkungan, pendidikan, hukum dan komponen yang berkaitan dengan sosial politik. Ini isu dominan dari



seluruh organisasi kepemudaan yang pernah penulis amati. Aktivist mahasiswa telah diproduksi untuk menjadi *agent of change*, perubah sosial, *social of control*, kontrol sosial atas penyimpangan dan yang terakhir *moral of force*, membangun tatanan moralitas dilihat dari peran sosialnya. (Lahur, 1987)

Aktivist kepemudaan, mahasiswa yang tidak peka terhadap situasi terkini, sosial akan dikecam tidak aktif, pasif dan dianggap membangkan dari aliran pemikiran dasar kelembagaan. Bahkan aktivis yang tidak kritis hanya selalu dilihat dari sisi pragmatis sehingga mahasiswa mau tidak mau harus mengarahkan seluruh kajian dan aspek progresnya pada perjuangan sosial kemasyarakatan. Untuk menunjang perjuangan tersebut maka mahasiswa menguatkan training politik, advokasi, sosial pendidikan bahkan langsung melakukan studi kasus. Semua proses konsolidasi pengetahuan tersebut menempatkan kemampuan mahasiswa diarahkan pada aspek kemampuan sosial, bagaimana mengamati proses politik, membentuk pola gerakan dan meresponnya secara bijak dengan bentuk aksi, selebaran maupun diskusi semesta semuanya bertumpu pada isu-isu sosial politik.

Atas proses awal perkaderan dan konsolidasi sosial baik dalam bentuk aktivitas di kepengurusan maupun kepanitian semuanya memaksa cara pandang mahasiswa harus menjadi manusia sosial secara utuh. Analisa kasus tersebut, proses perkaderan dan *rekrutmen* awal membentuk kader ideologis sesuai pandangan organisasi. proses ini dengan menghadirkan materi-materi penunjang baik penegasan idealisme perjuangan lembaga, arah politik maupun penguatan

soal-soal yang berkaitan dengan gerakan kepemudaan. semua hkan pada arah yang sangat ekstrim yakni gerakan kepemudaan dan jawab sosial yang sifatnya konsolidatif.



Disisi lain desain kepengurusan dan isu berkembang menjadi tertentukan dari sisi perjuangan sosial, semua isu kepengurusan adalah merupakan manifestasi roh gerakan sosial bahkan model yang dikembangkan di dalam struktur menempatkan logika ANSOS (analisis sosial) menjadi dasarnya dengan muatan teoritik Marx, peran para nabi atau teori sosial perubahan. Teori Darwin yang sifanya evolusioner sedikit banyak tidak menjadi menarik dalam diskursus kepengurusan maupun pembentukan watak kader. Kondisi ini menjauhkan anak muda, mahasiswa semakin tidak memahami ilmu-ilmu eksakta. Anda akan muda menemukan aktivis pergerakan tidak tau rumus matematika meski tetap ada tetapi jumlahnya terbatas dibanding pengetahuan sosial yang sangat menonjol. Bahkan banyak aktivis yang sebelum bergabung dalam organisasi kepemudaan yang punya pengetahuan eksakta seperti matematika menjadi sedikit demi sedikit tertutupi oleh kajian sosial, sampai akhirnya tidak diingat lagi.

Kajian dan ranah serta peran organisasi kepemudaan itulah yang membuatnya jauh dari rumus eksakta padahal ini juga penting dalam kehidupan apalagi jika kita memasuki sepenuhnya era profesional tahun 2015-2025. Peran organisasi membuat seluruh komponen terarah kesana sementara tradisi yang berkembang memang sudah demikian adanya, sudah menjadi mutlak diskursus sosial menjadi domain utamanya. Kondisi tersebut membuat nalar eksakta dalam kepengurusan di bungkam, mereka yang memiliki bakat eksakta harus berfikir, 1. meninggalkan organisasinya, 2. tetap di organisasinya tapi mengabaikan bakat eksaktanya, 3 tetap diorganisasinya dengan mengdepankan kajian-kajian yang pasti tidak akan menarik bagi yang lain. (Kusuma, 2011)

al yang ketiga dari muatan di atas, orang yang punya kemampuan ilmu namun tidak punya penampungan harus membangun tradisi sendiri



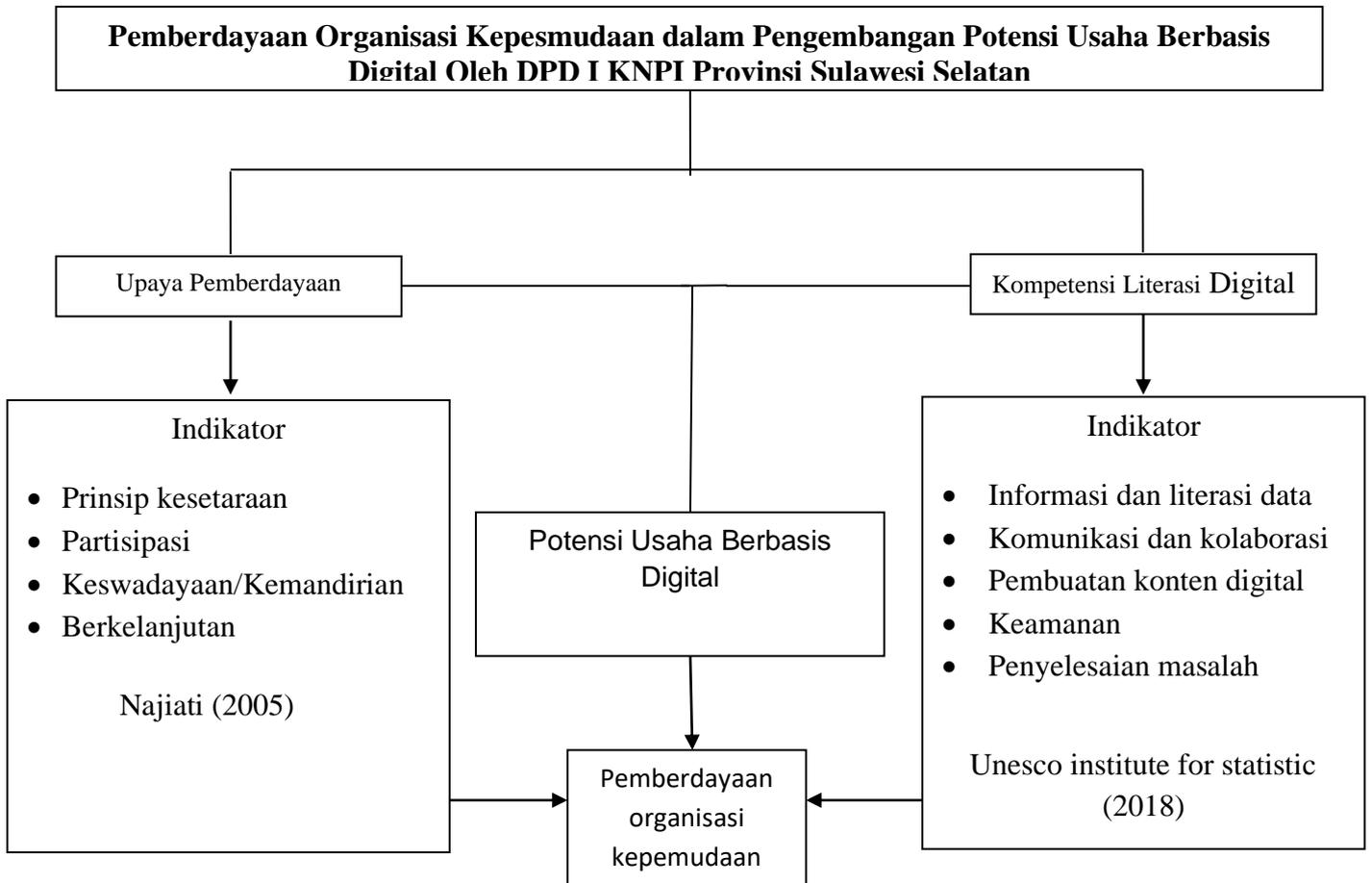
dalam organisasi, membuat kelompok diskursus di luar lembaga atau membantuk lembaga kekaryaan minimal meredam ketiadaan arah penguatan kemampuan ilmu eksakta dalam organisasi.

D. Defenisi Operasional

1. Kompetensi literasi digital dalam penelitian ini adalah kemampuan masyarakat menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi usaha berbasis digital.
2. Organisasi kepemudaan dalam penelitian ini adalah organisasi berhimpun kepemudaan yang yaitu KNPI Sulsel, Badko HMI Sulselbar, PKC PMII Sulsel dan DPD IMM Sulsel.
3. Usaha berbasis digital dalam penelitian ini adalah kemampuan mengenali, menyusun cara baru dalam memanfaatkan sumber daya usaha berbasis digital atau teknologi informasi.
4. DPD I KNPI Sulawesi Selatan dalam penelitian ini adalah Organisasi KNPI yang berkedudukan di tingkat provinsi



E. Kerangka Pikir



Penelitian dengan judul pemberdayaan organisasi kepemudaan dalam pengembangan potensi usaha berbasis digital oleh DPD I KNPI provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan sebagai upaya untuk mendeskripsikan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang diselenggarakan melalui program organisasi kepemudaan DPD I KNPI provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberdayaan masyarakat diukur melalui empat indikator, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan berkelanjutan. Program penelitian fokus pada usaha berbasis digital sehingga dilakukan pula pengukuran



kompetensi literasi digital masyarakat melalui lima indikator, yaitu informasi dan literasi data, komunikasi dan kolaborasi, pembuatan konten digital, keamanan, dan penyelesaian masalah. Dengan demikian keberhasilan pencapaian pemberdayaan masyarakat dan literasi digital masyarakat dapat memberikan gambaran tentang potensi usaha berbasis digital yang dapat dilakukan oleh masyarakat melalui program pemberdayaan oleh organisasi kepemudaan DPD I KNPI provinsi Sulawesi Selatan.

